

KESIAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA POLITEKNIK NEGERI PADANG

Sepri Neswardi

Dosen Politeknik Negeri Padang Jurusan Administrasi Niaga

E-mail : sepri_neswardi@yahoo.com

ABSTRACT

In the central government, Reporting and accounting entity will begin implementing full accrual basis accounting in the preparation of government financial statements. The research method is descriptive research with a qualitative approach. This approach is used so that researchers understand how Padang State Polytechnic prepares itself in the application of government accrual accounting standards. Acceleration strategies for applying accrual basis accounting using SWOT matrix analysis. Principally, The Padang State Polytechnic Work Unit is committed to implementing government accounting standards based on the accruals stipulated in PP.71/2010. In terms of commitment, infrastructure and information technology have made several preparations to support the implementation of SAP. The Constraints of implementation PP.71/2010 is that insufficient in understanding PP.71/2010 competencies, so that in the field of accounting or government accounting in general is still lacking, coordination between fellow financial managers and unfair disbursement, socialization and training on SAP accruals, and poor planning. So finally, The strategy of acceleration in the application of SAP accruals at Padang State Polytechnic which is possible to be implemented is an aggressive strategy.

Keywords : *Readiness, Accrual based accounting, strategy*

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Jadi sebenarnya dari tahun 2003, pencatatan dan penyajian laporan keuangan sudah diarahkan untuk berbasis akrual. Namun demikian ada masa transisi untuk menuju akrual penuh yang dijelaskan pada pasal 36 ayat (1) di Undang-Undang yang sama bahwa, ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Laporan Keuangan Posisi 31 Desember 2014 Politeknik Negeri Padang masih menerapkan PP No. 24 Tahun 2005 pada Laporan Keuangannya, yakni pada penyajian Laporan Keuangan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual dimana mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Basis kas menuju akrual ini melakukan pencatatan dengan cara menggunakan basis kas pada periode pelaksanaan anggaran yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima ke kas negara dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas negara. Pada akhir periode diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk mencatat belanja harta tetap yang dilakukan pada periode pelaksanaan, serta mencatat hak ataupun kewajiban negara. Basis kas untuk pendapatan dan belanja yang dilakukan pada periode anggaran, akan menghasilkan penyusunan laporan realisasi anggaran dan

laporan arus kas, sedangkan pencatatan pada akhir periode dengan jurnal akan diperoleh neraca. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur neraca sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan unsur laporan realisasi anggaran. Dengan kata lain, Sampai saat ini penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut belum terealisasi dengan maksimal. Hal ini merupakan tantangan besar bagi satuan kerja pemerintah dan harus dilakukan secara cermat dengan persiapan yang matang dan terstruktur.

Penelitian penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut Kusuma (2013) faktor pelatihan kepada staf keuangan terkait penerapan akuntansi akrual terbukti berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual. Menurut Ardiansyah (2013) menemukan adanya bukti pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sesuai dengan penelitian Setyaningsih (2013) tingkat pemahaman aparatur pemerintah kota Surakarta terhadap SAP 2010 ternyata masih rendah aparatur pemerintah kota Surakarta telah mampu bekerja secara mandiri dalam melaksanakan SAP ini, namun partisipan menyatakan masih adanya kerumitan teknis penyusunan pelaporan. Faktor penghambat pelaksanaan SAP berupa fasilitas yang minim, pendidikan staf yang tidak sesuai, kurangnya pengalaman, kurangnya sosialisasi dan tidak adanya insentif bagi pelaksanaan SAP yang baik, bermuara pada rendahnya komitmen pimpinan sehingga mengakibatkan kurang dipertimbangkannya anggaran yang cukup untuk pelatihan dan sosialisasi. Belum adanya payung hukum berupa peraturan walikota yang memuat petunjuk teknis pelaksanaan SAP 2010. Menurut Purwaniati (2008) terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi di inspektorat jenderal, pengetahuan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon 1 dan unit akuntansi pembantu pengelola barang dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Keberhasilan suatu perubahan akuntansi pemerintahan menuju basis akrual agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak. Adanya kewajiban satuan kerja untuk menerapkan system akuntansi berbasis akrual maka perlu dilakukan kajian tentang kesiapan pengelola keuangan, aturan, komitmen manajemen satuan kerja dan kesiapan sistem aplikasi dalam mengakomodasi system akuntansi yang berbasis akrual tersebut. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kesiapan satuan kerja Politeknik Negeri Padang dari segi pengelola keuangan, komitmen, sarana prasarana dan teknologi informasi, untuk mengetahui kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Politeknik Negeri Padang, untuk mengetahui model strategis akselerasi implementasi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Politeknik Negeri Padang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kesiapan

Menurut Suharsimi (2001) bahwa kesiapan adalah suatu kompetensi berarti sehingga seseorang yang mempunyai kompetensi berarti seseorang tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat sesuatu. Menurut Slameto (2010) kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon.

Kesiapan/*readiness* sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan. Suatu kondisi dikatakan siap mencakup beberapa aspek, menurut Slameto (2010) ada tiga aspek yang mempengaruhi kesiapan yaitu:

- a. Kondisi fisik, mental, dan emosional
- b. Kebutuhan atau motif tujuan
- c. Keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang telah dipelajari.

Slameto juga mengungkapkan tentang prinsip-prinsip *readiness* atau kesiapan yaitu:

- a. Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi).
- b. Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari pengalaman.
- c. Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan. Kesiapan dasar untuk kegiatan tertentu terbentuk dalam periode tertentu selama masa pembentukan dalam masa perkembangan

2.2 Akuntansi Pemerintahan

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.

Sebagai salah satu bidang dalam ilmu akuntansi, definisi akuntansi pemerintahan tak akan terlepas dari pemahaman tentang akuntansi itu sendiri, termasuk perkembangannya di Indonesia. Sedangkan pengertian pemerintahan, meskipun tampaknya konotasi lembaga politik lebih menonjol, aspek ekonominya tidak dapat dikesampingkan. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara. Di samping itu, termasuk kesesuaiannya yang berlaku. (Noerdiawan,2007).

2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI no 24 tahun 2005).

Komite SAP terdiri atas komite konsultatif dan komite kerja. Komite konsultatif bertugas memberi konsultasi dan atau pendapat dalam rangka perumusan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP, dan dalam melaksanakan tugasnya, dapat membentuk kelompok kerja. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Komite SAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. Komite SAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini yang diteliti adalah kesiapan implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dilihat dari penggunaan indikator kesiapan pengelola keuangan, komitmen, sarana dan prasarana dan teknologi informasi.

Penelitian ini akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama adalah menentukan bagaimana kesiapan satuan kerja Politeknik Negeri Padang dalam pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Tahap ini dilakukan dengan kuesioner bagaimana kesiapan pengelola keuangan, komitmen, sarana dan prasarana dan teknologi informasi mulai dari kesiapan pengelola keuangan tentang pemahaman secara umum, komitmen instansi.
- b. Tahap kedua dilanjutkan dengan mengidentifikasi yang menjadi kendala dalam implementasi standar akuntansi pemerintah PP no.71 Tahun 2010. Tahap kedua ini akan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses dalam implementasi SAP berbasis akrual.
- c. Data yang telah diperoleh, diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan alat analisis *SWOT* yang merupakan analisis kualitatif yang dilaksanakan dengan mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Satuan Kerja Politeknik Negeri Padang Kampus Limau Manis, Padang Sumatera Barat. Jangka waktu penelitian adalah 6 (enam) bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Sampel yang dijadikan responden tentang kesiapan pengelola keuangan, komitmen, sarana prasarana teknologi informasi yang akan memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan tentang standar akuntansi berbasis akrual. Kuesioner yang disebarakan kepada responden didasari oleh tugas, tanggungjawab dan fungsi terkait pengelolaan keuangan. Responden yang diberikan kuesioner adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Responden Kuesioner

No	Responden	Jumlah
1	Struktural terdiri dari direktur/KPA, Wakil Direktur II, Kepala bagian Umum administrasi Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum	4 orang
2	Unit Keuangan	8 orang
3	Unit Perencanaan	3 orang
4	Unit Umum	2 orang
Jumlah		17 orang

Sumber: Politeknik Negeri Padang

Wawancara untuk mendalami kesiapan implementasi standar akuntansi pemerintah basis akrual pada Politeknik Negeri Padang. Penentuan responden yang diwawancara dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu menentukan objek penelitian atau responden berdasarkan tujuan atau kebutuhan penelitian. Metode ini dilakukan dengan mewawancarai secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya. Adapun yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Responden Wawancara Mendalam (*indepth interveiw*)

No	Responden	Jumlah
1	Wakil Direktur II	1 orang
2	Kepala Urusan Keuangan	1 orang
3	Operator Sistem Akuntansi Keuangan	1 orang
4	Operator Simak BMN	1 orang
5	Bendahara Penerimaan	1 orang
6	Bendahara Penerimaan Pembantu	2 orang
	Jumlah	7 Orang

Sumber: Politeknik Negeri Padang

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya, metode-metode pengumpulan data dalam penelitian deskriptif kualitatif sekaligus juga adalah metode analisis data, dengan kata lain prosedur metodis sekaligus juga adalah strategi analisis data itu sendiri, sehingga proses pengumpulan data juga sekaligus adalah proses analisis data. Sesuai dengan desain penelitian yang diuraikan di atas, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara.

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data kuesioner menggunakan aplikasi komputer SPSS. Hasil kuesioner dinyatakan dalam persentase (*quantitative data*). Interpretasi atas persentase untuk menjawab rumusan masalah didasarkan catatan pernyataan partisipan melalui wawancara mendalam (*qualitative data*). Data kualitatif dianalisis dengan mereduksi data, mengkode dan mengkategorikan data (Sekaran, 2003). Berikut tabel analisis data:

Tabel 3.3 Analisis Data

Rumusan Masalah	Subjek	Pengumpulan Data	Analisis Data	Output
Kesiapan implementasi akuntansi berbasis akrual pada Politeknik negeri padang	Pengelola Keuangan, komitmen, sarana prasarana, Teknologi Informasi	Kuesioner skala likert	Menggunakan aplikasi SPSS Statistik Deskriptif	Deskripsi kesiapan Pada Politeknik Negeri Padang
Hambatan penerapan SAP akrual pada Politeknik Negeri Padang	Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan	Wawancara Mendalam	Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan Pola Jawaban	Kendala dan hambatan dalam implementasi SAP akrual
Model strategis akselerasi implementasi (SAP) basis akrual pada Politeknik Negeri Padang	Faktor Internal kekuatan, kelemahan, Faktor Eksternal peluang, dan ancaman	Hasil Kuesioner dan wawancara	Matrix SWOT Analisis	Modelstrategi akselerasi implementasi yang sesuai pada Politeknik Negeri Padang

Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, 2012

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data kesioner yang di sebar, maka disajikan tentang deskripsi responden sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin, jumlah responden yang berjenis kelamin wanita lebih banyak sebesar 12 orang atau 71% (persen). Sedangkan yang berjenis

kelamin pria 5 orang atau 29% (persen). Artinya bahwa sebagian besar jenis pengelolaan keuangan dan anggaran adalah wanita.

2. Berdasarkan Usia, jumlah responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 4 orang atau 23.52% (persen). Responden yang berumur 31-40 tahun sebanyak 8 orang atau 47.05% (persen). Responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 2 orang atau 11.79% (persen) dan yang berumur 51-60 tahun sebanyak 3 orang atau 17.64%. Berdasarkan data yang tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar usia responden berada pada usia 31 sampai 40 tahun.
3. Berdasarkan Pendidikan, jumlah responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 1 orang atau 5,88% (persen). Responden yang berpendidikan D3 sebanyak 2 orang atau 11.78 (persen). Responden yang berpendidikan S1 sebanyak 7 orang atau 41.17% (persen). Sedangkan responden yang berpendidikan S2 sebanyak 7 orang atau 41.17% (persen). Berdasarkan data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden yang terdapat dalam penelitian ini adalah berpendidikan Srata 2 dan Strata 1.
4. Berdasarkan Lama Bekerja, jumlah responden yang bekerja selama ≤ 5 Tahun sebanyak 3 orang atau 17.64% (persen). Responden yang bekerja selama 6-10 Tahun sebanyak 4 orang atau 23.53% (persen). Responden yang bekerja selama 11 - 20 Tahun sebanyak 6 orang atau 35.30% (persen). Responden yang bekerja selama 20 - 30 Tahun sebanyak 4 orang atau 23.53% (persen). Berdasarkan data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden telah bekerja dalam kelompok 11 sampai 20 Tahun.
5. Berdasarkan Jurusan Pendidikan, jumlah responden yang jurusan pendidikan akuntansi sebanyak 4 orang atau 23.52%. Responden yang jurusan pendidikan manajemen sebanyak 6 orang atau 35.29%. Responden yang jurusan pendidikan elektronika sebanyak 2 orang atau 11.79%. Responden yang jurusan pendidikan hukum sebanyak 1 orang atau 5.88%. Responden yang jurusan pendidikan mesin sebanyak 2 orang atau 11.76%. Responden yang jurusan pendidikan sosial dan kearsipan masing-masing sebanyak 1 orang atau 5.88%. Berdasarkan data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar jurusan pendidikan responden yang terdapat dalam penelitian ini adalah ekonomi manajemen.

4.3.2 Deskripsi Data Kesiapan Implementasi SAP Berbasis Akruwal

1. Kesiapan Pengelola Keuangan

Kesiapan implementasi SAP basis akruwal dari segi kesiapan pengelola keuangan dapat dilihat berdasarkan indikator terkait dengan pengetahuan dan pemahaman (Setyaningsih 2013). Hasil tanggapan 17 (tujuh belas) orang responden terhadap sepuluh item pernyataan yang digunakan, dapat dilihat pada tabel 4.1. Pernyataan kesiapan pengelola keuangan berdasarkan indikator memiliki pengetahuan memadai tentang tujuan SAP 2010 paling banyak menjawab 7 responden netral dan 1 orang menjawab sangat tidak setuju. Indikator memiliki analisa yang baik atas Laporan Operasional, Neraca, LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK, 9 orang menjawab netral dan 4 orang menjawab setuju serta 4 orang menjawab tidak setuju.

Indikator paham sepenuhnya konsekuensi tidak tersusunnya Laporan Keuangan instansi sesuai SAP 2010, menjawab netral 8 orang dan menjawab setuju 8 orang serta menjawab tidak setuju 1 orang. Indikator paham SAP 2010 berbasis akruwal untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan, finansial,

terbanyak menjawab 7 orang setuju, 3 orang tidak setuju, 6 orang netral, serta paling sedikit 1 orang menjawab sangat setuju. Indikator paham dan bisa menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah sebanyak 9 orang tidak setuju 4 orang setuju 3 orang netral dan dan 1 orang menjawab sangat tidak setuju

Tabel 4.1 Pernyataan Kesiapan Pengelola Keuangan

No	Pernyataan Kesiapan Pengelola Keuangan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya memiliki pengetahuan memadai tentang tujuan SAP 2010.	1	4	7	5	-
2	Saya memiliki analisa yang baik atas Laporan Operasional, Neraca, LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK	-	4	9	4	-
3	Saya paham sepenuhnya konsekuensi tidak tersusunnya Laporan Keuangan instansi sesuai SAP 2010	-	1	8	8	
4	Saya paham SAP 2010 berbasis akrual untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan, finansial.	-	3	6	7	1
5	Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.	1	9	3	4	-
6	Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.	-	6	7	4	
7	Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.	-	3	8	4	2
8	Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.	-	4	7	6	-
9	Saya paham dan bisa menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.	-	5	8	4	-
10	Saya paham aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.	1	5	4	6	1
Jumlah		3	44	67	52	4
Persentase		1,76%	22,88%	39,41%	30,41%	2,35%

(Sumber: data primer yang diolah)

Penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, menjawab 7 orang menjawab netral, 6 orang menjawab tidak setuju dan 4 orang menjawab setuju. Indikator paham dan bisa menyediakan informasi mengenai

ketaatan realisasi terhadap anggarannya. Responden menjawab 8 orang menjawab netral, 4 orang setuju, 3 orang tidak setuju dan 2 orang menjawab sangat setuju. Indikator paham dan bisa menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Responden menjawab 7 orang netral, 6 orang setuju dan 4 orang tidak setuju. Indikator paham dan bisa menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Responden menjawab 8 orang netral, 5 orang tidak setuju dan 4 orang setuju. Indikator paham aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Responden menjawab 6 orang setuju, 5 orang tidak setuju, 4 orang netral 1 orang tidak setuju serta sangat setuju menjawab 1 orang.

Faktor sumber daya manusia yaitu pengelola keuangan menjadi variabel yang sangat berpengaruh besar terhadap kesuksesan penerapan standar akuntansi basis akrual. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4.6 maka dapat dikatakan sebagian besar tidak memberikan pendapat (netral) terhadap pernyataan yang diberikan yaitu sebesar 39, 41 %. Sementara yang menjawab setuju yaitu 30,41%, meskipun tidak semua pengelola keuangan Politeknik Negeri Padang yang paham secara material terhadap penerapan SAP akrual namun sebagian besar setuju untuk menerima dan beralih ke standar akuntansi akrual pada pelaporan keuangan Semester I Tahun 2015.

2. Komitmen Instansi

Komitmen instansi dalam kesiapan implementasi SAP basis akrual dilihat berdasarkan indikator terkait keinginan, keyakinan dan dukungan yang kuat Satuan Kerja Politeknik Negeri Padang untuk implementasi SAP Basis akrual. Hasil tanggapan 17 (tujuhbelas) orang responden terhadap sepuluh item pernyataan yang digunakan, dapat dilihat pada tabel 4.2. Pada tabel tersebut dapat dilihat pernyataan komitmen instansi berdasarkan indikator instansi telah mampu menyusun laporan keuangan berdasar SAP basis akrual tanpa bantuan pihak luar. Responden menjawab 9 orang setuju, 4 orang netral dan tidak setuju 4 orang. Indikator instansi telah mampu menyusun laporan keuangan berdasar SAP akrual dengan kerjasama dengan pihak luar. Responden menjawab 11 orang menjawab setuju, 3 orang netral, 2 orang tidak setuju dan 1 orang sangat tidak setuju.

Indikator secara rutin laporan keuangan instansi disajikan tepat waktu. Responden menjawab 11 orang setuju, 3 orang netral dan 3 orang menjawab sangat setuju. Indikator standar akuntansi pemerintah basis akrual memerlukan integritas dalam pelaksanaan. Responden menjawab 9 orang menjawab setuju, 4 orang netral, 2 orang tidak setuju dan 2 orang menjawab sangat setuju. Indikator instansi mempunyai prinsip transparan dalam mendiskusikan permasalahan SAP basis akrual dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan. Responden menjawab 11 setuju, 4 orang netral, 1 orang tidak setuju dan 1 orang menjawab sangat setuju.

Instansi memiliki kemauan untuk mencapai hasil kerja yang baik. Responden menjawab 9 orang setuju, 5 orang sangat setuju, 2 orang netral dan 1 orang tidak setuju. Indikator instansi memiliki kesiapan komitmen untuk melaksanakan sesuai aturan tentang standar akuntansi berbasis akrual. Responden menjawab 9 orang menjawab setuju, 5 orang netral, 2 orang sangat setuju dan 1 orang menjawab tidak setuju. Indikator kesiapan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama instansi. Responden menjawab 10 orang setuju, 4 orang netral, 2 orang sangat setuju dan 1 orang menjawab tidak setuju.

Pemahaman setiap peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan. Responden menjawab 10 orang setuju, 4 orang netral, 2 orang sangat setuju dan 1 orang menjawab tidak setuju. Indikator bersedia mengerjakan pekerjaan baru dan memberikan hasil yang terbaik dari setiap pekerjaan. Responden menjawab 10 orang setuju, 4 orang netral dan 3 orang menjawab sangat setuju.

Komitmen merupakan elemen pokok yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan SAP akrual. Kuesioner untuk variabel komitmen diwakili oleh 10 pernyataan. Sesuai dengan hasil tabel 4.8 menggambarkan bahwa jika dilihat dari segi komitmen instansi Politeknik Negeri Padang dapat dikategorikan setuju sebanyak 58.23% terhadap pernyataan yang dibuat. Ini berarti komitmen instansi siap untuk penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual.

Tabel 4.2 Pernyataan Komitmen Instansi

No	Pernyataan Komitmen Instansi	ST	TS	N	S	SS
		S				
1	Instansi telah mampu menyusun laporan keuangan berdasar SAP basis akrual tanpa bantuan pihak luar.	-	4	4	9	-
2	Instansi telah mampu menyusun laporan keuangan berdasar SAP akrual dengan kerjasama dengan pihak luar.	-	2	3	11	1
3	Secara rutin laporan keuangan instansi disajikan tepat waktu	-	-	3	11	3
4	SAP basis akrual memerlukan integritas dalam pelaksanaan	-	2	4	9	2
5	Instansi mempunyai prinsip transparan dalam mendiskusikan permasalahan SAP basis akrual dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan	-	1	4	11	1
6	Instansi memiliki kemauan untuk mencapai hasil kerja yang baik	-	1	2	9	5
7	Instansi memiliki kesiapan komitmen untuk melaksanakan sesuai aturan tentang standar akuntansi berbasis akrual	-	1	5	9	2
8	Kesiapan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama instansi	-	1	4	10	2
9	Memahami setiap peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan	-	1	4	10	2
10	Bersedia mengerjakan pekerjaan baru dan memberikan hasil yang terbaik dari setiap pekerjaan	-	-	4	10	3
	Jumlah	0	13	37	99	21
	Persentase	0	7,64%	21,76%	58,23%	12,35%

(Sumber : data primer yang diolah)

3. Sarana dan Prasarana

Kesiapan implementasi SAP basis akrual dari segi kesiapan sarana dan prasana. Hasil tanggapan 17 orang responden terhadap sepuluh item pernyataan yang digunakan dapat dilihat pada tabel 4.3. Pernyataan mengenai sarana dan prasana dengan indikator instansi merencanakan sarana dan prasana sesuai dengan kebutuhan. Responden menjawab 9 orang setuju, 6 orang netral, 1 orang tidak setuju dan 1 orang lagi menjawab sangat setuju. Indikator kesiapan dukungan anggaran yang memadai khususnya untuk

operasi standar akuntansi pemerintah. Responden menjawab 11 orang setuju, 4 orang netral, dan 2 orang menjawab tidak setuju.

Kelengkapan sarana kantor untuk mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan. Responden menjawab 8 orang setuju, 5 orang netral dan 4 orang menjawab sangat setuju. Indikator Penyediaan tempat penyimpanan dokumen yang memadai. Responden menjawab 8 orang setuju, 5 orang netral, 3 orang sangat setuju dan 1 orang menjawab tidak setuju.

Tata letak meubelair yang mendukung penerapan SAP berbasis akrual. Responden menjawab 10 orang setuju, 4 orang netral, 2 orang sangat setuju dan 1 orang menjawab tidak setuju. Indikator kemauan dan integritas untuk menyiapkan sarana ruangan yang memadai. Responden menjawab 11 orang setuju, 6 orang netral. Indikator menyiapkan dukungan sarana prasarana perangkat lunak yang memadai. Responden menjawab 10 orang setuju, 5 orang sangat setuju, 2 orang netral. Indikator menyediakan jaringan internet dan intranet dalam penerapan SAP berbasis akrual. Responden menjawab 7 orang setuju, 6 orang sangat setuju, 3 orang netral dan 1 orang menjawab tidak setuju. Indikator memanfaatkan sarana yang diperlukan dalam dalam melaksanakan pekerjaan. Responden menjawab 13 orang setuju, 9 orang sangat setuju, dan 2 orang menjawab netral. Indikator ketersediaan akses komunikasi yang memudahkan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Responden menjawab 9 orang setuju, 5 orang sangat setuju dan 3 orang menjawab netral.

Tabel 4.3 Pernyataan Kesiapan Sarana dan Prasana

No	Pernyataan Sarana dan Prasana	STS	TS	N	S	SS
1	Instansi merencanakan sarana dan prasana sesuai dengan kebutuhan	-	1	6	9	1
2	Kesiapan dukungan anggaran yang memadai khususnya untuk operasi standar akuntansi pemerintah	-	2	4	11	-
3	Melengkapi sarana kantor untuk mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan	-	-	5	8	4
4	Penyediaan tempat penyimpanan dokumen yang memadai	-	1	5	8	3
5	Tata letak meubelair yang mendukung penerapan SAP berbasis akrual	-	1	4	10	2
6	Kemauan dan integritas untuk menyiapkan sarana ruangan yang memadai	-	-	6	11	-
7	Menyiapkan dukungan sarana prasarana perangkat lunak yang memadai	-	-	2	10	5
8	Menyediaan jaringan internet dan intranet dalam penerapan SAP berbasis akrual	-	1	3	7	6
9	Memanfaatkan sarana yang diperlukan dalam dalam melaksanakan pekerjaan	-	-	2	13	2
10	Ketersediaan akses komunikasi yang memudahkan mendapatkan informasi yang dibutuhkan	-	-	3	9	5
Jumlah		0	6	40	96	28
Persentase		0	3,52%	23,52%	56,47%	16,47%

(Sumber : data primer yang diolah)

Sarana dan prasana sangat dibutuhkan dalam pengelola keuangan. Ketersediaan sarana dan prasana yang memadai akan membantu penerapan SAP akrual karena pengelola keuangan telah ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

untuk melaksanakan fungsinya. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4.8 kesiapan sarana prasana satuan kerja Politeknik Negeri Padang menunjukkan sebagian besar menjawab setuju terhadap pernyataan yang disampaikan yaitu sebesar 56,47% . Ini berarti bahwa sarana prasana telah cukup memadai untuk melaksanakan SAP akrual

4. Teknologi Informasi

Perangkat pendukung yang memberikan kemudahan kepada penyusun laporan keuangan pemerintah dalam kesiapan implementasi SAP basis akrual. Teknologi informasi meliputi (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*). Hasil tanggapan 17orang responden terhadap sepuluh item pernyataan yang digunakan dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Pernyataan Kesiapan Teknologi Informasi

No	Pernyataan Teknologi Informasi	STS	TS	N	S	SS
1	Sistem informasi dalam penyusunan laporan keuangan mudah dipahami	-	3	7	7	
2	Teknologi informasi yang dirancang sesuai kebutuhan instansi	-		3	13	1
3	Sistem manajemen informasi yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat.	-	-	3	9	5
4	Kesiapan sistem perangkat lunak (<i>software</i>) standar akuntansi pemerintah yang implementatif	-	1	8	5	3
5	Instansi melakukan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan untuk SAP berbasis akrual	-	-	6	7	4
6	Kesiapan teknologi informasi untuk memproses dan penyimpanan data	-	1	4	5	7
7	Teknologi informasi dalam penyebaran informasi sesuai kebutuhan	-	1	2	9	5
8	pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam menunjang pekerjaan	-	-	7	6	4
9	ketersediaan sistem informasi manajemen yang efektif dan terintegrasi	-	-	4	10	3
10	Adanya pengembangan teknologi informasi komputer dalam instansi	-	-	5	8	4
	Jumlah	0	6	49	79	36
	Persentase	0	3,52%	28,82%	46,47%	21,17%

(Sumber: data primer yang diolah)

Pernyataan mengenai teknologi informasi dengan indikator sistem informasi dalam penyusunan laporan keuangan mudah dipahami. Responden menjawab 7 orang setuju, 7 orang netral dan 3 orang menjawab tidak setuju. Indikator teknologi informasi yang dirancang sesuai kebutuhan instansi. Responden menjawab 13 orang setuju, 3 orang tidak setuju 1 orang menjawab sangat setuju. Sistem manajemen informasi yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat. Responden menjawab 9 setuju, 5 sangat setuju dan 3 menjawab netral. Indikator kesiapan sistem perangkat lunak (*software*) standar akuntansi pemerintah yang implementatif. Responden menjawab 8 orang netral, 5 orang setuju dan 3 orang sangat setuju, dan 1 orang menjawab tidak setuju. Indikator instansi melakukan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan untuk SAP berbasis akrual. Responden menjawab 7 orang setuju, 6 orang netral dan 4 orang menjawab sangat setuju. Indikator kesiapan teknologi informasi untuk memproses dan penyimpanan data. Responden menjawab 7 orang sangat setuju, 5 orang setuju, 4 orang netral dan 1 orang menjawab tidak setuju. Teknologi informasi dalam penyebaran informasi sesuai kebutuhan. Responden menjawab 9 orang setuju, 5 orang sangat setuju,

2 orang netral dan 1 orang tidak setuju. Indikator pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam menunjang pekerjaan. Responden menjawab 7 orang netral, 6 orang setuju dan 4 orang sangat setuju. Indikator ketersediaan sistem informasi manajemen yang efektif dan terintegrasi. Responden menjawab 10 orang setuju, 4 orang netral dan 3 orang menjawab sangat setuju. Indikator adanya pengembangan teknologi informasi komputer dalam instansi. Responden menjawab 8 orang setuju, 4 orang sangat setuju dan 5 orang menjawab netral.

Pelaksanaan SAP akrual juga tidak mungkin lepas dari peranan teknologi informasi. Teknologi informasi akan membantu pengguna SAP akrual untuk mengelola data keuangan untuk dijadikan laporan keuangan satuan kerja. Sistem akuntansi dalam konteks penerapan SAP akrual yaitu kesediaan perangkat lunak (*software*) untuk mengaplikasikan proses keuangan di pemerintahan. Mengingat peran strategis dari sistem informasi tersebut, maka penilaian atas kesiapan teknologi informasi dalam penerapan SAP akrual harus dilakukan. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4.9 sesuai dengan hasil kuesioner bahwa sebagian besar menjawab setuju yaitu sebesar 46,47%. Ini dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi siap untuk menerapkan SAP basis akrual.

Hasil deskripsi identitas responden menunjukkan pengelola keuangan sebagian besar wanita, berada pada usia produktif dimana umur 31-50 tahun sebesar 58.84%, pendidikan tinggi sebagian besar sarjana dalam dan masa kerja 11- 30 tahun sebesar 58.83%. Seharusnya dengan kondisi pengelola keuangan ini dapat menciptakan lingkungan kerja dengan paradigma yang disepakati untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kekuatan sumber daya manusia itu bukan saja pada jasmani atau jiwa yang dimiliki, namun kekuatan tersebut terletak pada semangat dan kemampuan kerja. Karena kerjasama tersebut akan mampu meningkatkan mutu dan mutu yang dicapai terus menerus, dipertahankan dan dikembangkan untuk menjadi kinerja yang dimiliki oleh kelompok yang bersangkutan. Kerjasama merupakan suatu nilai-nilai sangat penting dalam manajemen. Kenyataan pada Satuan Kerja Politeknik Negeri Padang tidak sesuai dengan semestinya dimana, kepekaan terhadap aturan-aturan pengelolaan keuangan yang baru dinilai masih rendah, bekerja sesuai dengan uraian tugas yang ada dan belum optimal untuk bekerjasama dengan unit lain, tidak ada sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai melanggar aturan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian mengenai kesiapan Politeknik Negeri Padang dalam kesiapan penerapan PP No.71 Tahun 2010 maka kesimpulan yang didapat diambil dari penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

2. Satuan Kerja Politeknik Negeri Padang pada prinsipnya mempunyai komitmen untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010. Dalam hal komitmen, sarana prasarana serta teknologi informasi telah dilakukan beberapa persiapan untuk mendukung pelaksanaan SAP tersebut.
3. Kendala dalam implementasi PP No.71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) antara lain, sampai saat ini kurangnya kualitas pengelola keuangan yang belum memadai dalam pemahaman PP No.71 Tahun 2010 sehingga kompetensi dibidang akuntansi pemerintahan atau akuntansi secara umum masih kurang, koordinasi antar sesama pengelola keuangan dan penganggaran yang kurang baik, lambatnya proses sosialisasi dan pelatihan mengenai SAP akrual, serta perencanaan yang masih kurang baik.

4. Strategi akselerasi/percepatan persiapan dalam penerapan SAP akrual di Politeknik Negeri Padang yang memungkinkan untuk dilaksanakan adalah strategi agresif, dapat diidentifikasi dari Analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal. karena kekuatan dari dalam internal dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi kelemahan serta ancaman yang ada. Analisis ini dilakukan untuk memberikan arahan yang jelas mengenai langkah-langkah yang ditempuh sebagai tindak lanjut atas solusi yang telah diungkap pada pembahasan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. 2013. *Factor Affecting The Affecting The Readiness of PP No.71 Tahun 2010 About Government Accounting Standars*. Journal Ekonomi
- Kusuma fuad. 2013. *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah*. Journal of Accounting Volume 2, Nomor 3 ISSN 2337. Yogyakarta.
- Noerdiawan D,Iswahyudi,Maulidah,2007, *Akuntansi Pemerintahan*,Jakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*.
- Purwaniati. 2008. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal ekonomi Bisnis 1 Vol.13 April 2008
- Sekaran Uma.2003. *Research Methods for Business : A Skill – Building Approach*, John Wiley & Sons, Inc., New York
- Setyaningsih. 2013. *Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Dan Anggota Dprd Terhadap Standar Akuntansi Berbasis Akrual (Studi Kasus Pemerintah Kota Surakarta)*.Manado. Simposium nasional akuntansi XVI, September 2013.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*
- Widjajarso,Bambang, 2008. *Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia:Sebuah Kajian Pendahuluan*.www.wikipedia.org diunduh tanggal 12 Januari 2015